

DAFTAR PUSTAKA

- Adeswoto, H., & Putra, A., A. 2018. Manajemen Risiko Pada Proyek Konstruksi di Pemerintah Kabupaten Kampar. *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN)*, 1(1), 61-68.
- Ahmad, Fahrizal Maizi. 2019. Analisis Manajemen Risiko Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. *Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung*, pp. 1182-1192.
- Ahmeti, Remzi., Vladi, Besarta. 2017. Risk Management in Public Sector: A Literature Review. *European Journal of Multidisciplinary Studies*. 2(5), 190-196.
- Amalia, Dina. 2023. Cara Melakukan Laporan Pajak Online Beserta Manfaatnya, (Online), (<https://www.jurnal.id/id/blog/pajak-online/>), diakses pada 25 Februari 2024).
- Andriani, D., A. 2017. Studi Tentang Prosedur Penilaian Aset Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Kota Samarinda. *Jurnal Adminisrtrasi Negara*, 5(1), 5666-5676.
- Apriyanto, K., Endroyono., & Nugroho, S. 2021. Analisis Manajemen Risiko SPBE Menggunakan COBIT 5 For Risk dan ISO 31000:2018 di Kabupaten Magetan. *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)*, 23(2), 107-123.
- Ari, Yuli. 2020. Implementasi Manajemen Risiko di Sektor Publik: Urgensi dan Tantangan. *Paris Review* Edisi, hlm 13-16.
- Arifuddin, O., Wahrudin, U., & Rusmana, F. D. 2020. *Manajemen Risiko*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Aryo, Wenang. 2020. *Membangun SDM Indonesia Membangun Sinergitas*, (Online), (<https://www.kemenkopmk.go.id/membangun-sdm-indonesia-membangun-sinergitas>), diakses pada 15 November 2023).
- Ashari, M., Wahyunadi, & Hailuddin. 2015. Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif tahun 2009-2013). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(2), 163-180.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bastida, Francisco., Bracci, Enrico., & Hoque, Zahirul. 2022. Accounting For Unstable Environments in The Public Sector: Managing Post-COVID-19 Times. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 34 (1), 1-26
- Bozeman, B., & Kingsley, G. 1998. Risk Culture in Public and Private Organizations. *Public Administration Review*, 58(2), 109-118.
- Bracci, E., Tallaki, M., Gobbo, G., & Papi, L. 2021. Risk management in the public sector: a structured literature review. *International Journal of Public Sector Management*, 34(2), 205–223.

- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan. 2014. *Tata Kelola, Manajemen Risiko, & Pengendalian Intern*. Bogor: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Braig, S., Gebre, B., & Sellgren, A. 2011. Strengthening Risk Management in The US Public Sector. *McKinsey & Company*.
- Braumann, E. C., Grabner, Isabella., Posch, Arthur. 2020. Tone from the top in risk management: A complementarity perspective on how control systems influence risk awareness. *Accounting, Organizations and Society. Volume 84, 1-17*.
- Badan Standarisasi Nasional. 2018. *Grand Desain Penerapan Manajemen Risiko*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- Damayanti, R. A., Syarifuddin, S., Zalshabila, S. 2023. Risk Management: The Awareness of Public Managers on Risk as a Social Construction. *International Journal of Professional Business Review, 8(7), 01-28*.
- Demidenko, E., & McNutt, P. 2010. The ethics of enterprise risk management as a key component of corporate governance. *International Journal of Social Economics, 37(10), 802– 815*.
- Devianto, Irfan. 2021. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai dalam Penilaian Atas Barang Milik Negara Berupa Bangunan*, (Online), (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13785/Faktor-Faktor-yang-Mempengaruhi-Nilai-Dalam-Penilaian-Atas-Barang-Milik-Negara-Berupa-Bangunan.html>), diakses pada 15 Januari 2024).
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 2009. *Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset Negara*, (Online), (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2320/Pengendalian-Intern-Atas-Pengelolaan-Aset-Negara.html>), diakses pada 20 Januari 2024).
- Direktorat Jenderal Pembendaharaan. 2022. *Optimalisasi Penyerapan Anggaran untuk Akhir Tahun yang Lebih Baik*, (Online), (<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/luwuk/id/data-publikasi/berita-terbaru/2894-optimalisasi-penyerapan-anggaran-untuk-akhir-tahun-yang-lebih-baik.html>), diakses pada 20 Januari 2024).
- Dobrea, C., & Ene, N. (2006). Adapting Risk Management Principles to the Public Sector Reforms. (6, Ed.) *Administratie Si Management Public*, 126-130.
- Dowdy, J., Maxwell J.R., & Rieckhoff, K. 2017. Organizational agility in the public sector: How to be agile beyond times of crisis. *McKinsey & Company*.
- Erniati. 2019. *Laporan Keuangan Pemerintah Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara*, (Online), (<https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2836-laporan-keuangan-pemerintah-sebagai-wujud-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-negara.html>), diakses pada 24 Februari 2024).
- Fadillah, A.Y., Aziza, N., Martiah, L. 2020. Pengaruh Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Fairness, 10(1), 63-78*.

- Fariani, E., & Indah, L. 2021. *Modul Manajemen Risiko Pelatihan Kepemimpinan Administrator*. Jakarta Pusat: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Febriyanta, I Made Murdwarsa. 2021. *Pengelolaan Risiko yang Optimal Melalui Manajemen Risiko*, (Online), (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jakarta/baca-artikel/14069/Pengelolaan-Risiko-yang-Optimal-Melalui-Manajemen-Risiko.html>), diakses pada 20 Juni 2023).
- Gibran. 2021. *APBD Tana Toraja Tahun 2022 Capai Rp1,1 Triliun*, (Online), (<https://zonakata.com/apbd-tana-toraja-tahun-2022-capai-rp11-triliun/>), diakses pada 25 Juni 2023).
- Herlianti, E., V., & Sanjaya, R., B. 2022. Dampak Positif Pariwisata Terhadap Budaya, Ekonomi, dan lingkungan di Kasepuhan Cipta Mulya. *Kritis*, 31(2), 132-149.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999*
- Irianto, Kurniawan. 2021. *Mengapa Belanja Pemerintah Selalu Meningkat di Akhir Tahun?*, (Online), (<https://www.cnbcindonesia.com/opini/20211223183110-14-301570/mengapa-belanja-pemerintah-selalu-meningkat-di-akhir-tahun>), diakses pada 15 November 2023).
- Ishak, J. F. 2021. Covid-19: Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 587-591.
- Kapuscinska, K., & Matejun M. 2014. Risk Management in Public Sector Organizations: A Case Study. *International Journal of Business and Management Studies*, 3(3), 129-143.
- Keputusan Kepala Arsip nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000 tentang Standar Penyimpanan Fisik Arsip. 2000*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan*. 2019. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2021. *Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia*. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Kumar, R. "Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners." Sage Publications: 3rd Ed.
- Khusaini, M. 2014. Local government planning and budgeting process: A case of districts and cities in Indonesia. *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*, 7(2).
- Leung, F., & Isaacs, F. 2008. Risk management in public sector research: approach and lessons learned at a national research organization. *R&D Management*, 38(5), 510-519.
- Manzoni, J., & Cheshire, S. 2017. *Management of Risk in Government*. United Kingdom: United Kingdom Government.

- Marbyanto, Edy. 2008. *Masalah Dalam Perencanaan*, (Online), (<https://edy-marbyanto.blogspot.com/2008/07/masalah-dalam-perencanaan.html>, diakses 15 November 2023).
- Martin, J., Wanna, J. 1996. *Financial Risk in the Public Sector: The Accountability Dilemmas of Entrepreneurialism*. South Melbourne: MacMillan Education Australia PTY LTD.
- Miles, M. B. & Huberman, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Nilsen, A., & Olsen, O. 2005. Different Strategies: Equal Practice? Risk Assessment and Management in Municipalities. *Palgrave Macmillan Journals*, 7(2), 37-47.
- Nugraha, Y., & Novianty, I. 2022. Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung. *Industrial Research Workshop and National Seminar*, pp. 1408-1411.
- Nursahidin. 2017. Problem Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran di Daerah. *Jurnal Publika Unswagati Cirebon*, 5(1), 60-71.
- Pasuruankab. 2019. *Bupati Irsyad Yusuf akan Sanksi Tegas Kepala OPD yang Tidak Serius Tindak Lanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan*, (Online), (<https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/bupati-irsyad-yusuf-akan-sanksi-tegas-kepala-opd-yang-tak-serius-tindak-lanjuti-rekomendasi-hasil-pemeriksaan>, diakses pada 25 Februari 2024).
- Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023*. 2022. Tana Toraja: Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat*. 2017. Kalimantan Barat: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*. 2010. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah*. 2017. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023*. 2022. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan*. 2008. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.

- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.* 2017. Jakarta: Menteri Pertahanan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.* 2018. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.* 2019. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.* 2023. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Pratiwi, Yenni. 2022. *Pentingnya Penilaian Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara*, (Online), (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14906/Pentingnya-Penilaian-Dalam-Pengelolaan-Barang-Milik-Negara.html>), diakses pada 15 November 2023).
- Sadat, Anwar. 2020. *Governmental Accounting (Akuntansi Pemerintahan)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Spikin, Ignacio Cienfuegos. 2013. Risk Management theory: The Integrated Perspective and Its Application in The Public Sector. *Estado, Gobierno, Gestión Pública*, pp. 89-126.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Sujarwo, H.N. 2014. *TKMRPI III-Manajemen Sumber Daya Organisasi*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP.
- Suryani, Anis. 2020. Manajemen Risiko di Pemerintah Daerah: Potret Permasalahan dan Tantangan, Evaluasi Dalam Perspektif Model Logika. *Paris Review Edisi 12*, hlm 19-22.
- Suwanda, Dadang. 2020. Risk Management Solutions in Local Government Financial Management. *A Y E R Journal*, 27(3), 34 - 81
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.* 2009. Jakarta: Dewan Perwakilan Republik Indonesia.
- Williams, R., Bertsch, B., Dale, B., Van Der Wiele, T., Van Iwaarden, J., Smith, M., & Visser, R. 2006. Quality and risk management: what are the key issues? *The TQM Magazine*, 18(1), 67– 86.

LAMPIRAN

Lampiran 1

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Amanda Evania Pasoloran
 Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 20 September 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Rumah : Jl. Telkom II Blok C2 No. 123 Taman Telkomas
 Telepon Rumah dan HP : 082188959823
 Alamat *E-mail* : amandapasoloran08@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- Tahun 2007 – 2008 : TK Ananda Makassar
- Tahun 2008 – 2014 : SD Frater Bakti Luhur Makassar
- Tahun 2014 – 2017 : SMP Frater Thamrin Makassar
- Tahun 2017 – 2020 : SMA Negeri 5 Makassar

Pendidikan Nonformal

- Tahun 2020 : Pelatihan Basic Character Learning Skills, Characters, and Creativity (BALANCE) Universitas Hasanuddin
- Tahun 2021 : Latihan Dasar Kepemimpinan PMKO Universitas Hasanuddin
- Tahun 2022 : Pelatihan Workshop Simulasi Bisnis MoonsonSIM (ERP)
- Tahun 2022 : Kuliah Umum Buku Panduan Akuntansi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan

Demikian data ini dibuat dengan sebenarnya,

Makassar, 28 Maret 2024

Amanda Evania Pasoloran

Lampiran 2

MANUSKRIP WAWANCARA PENELITIAN

Kategori Resiko : Perencanaan dan Penganggaran

Informan : BAPEDA, Sekertaris Daerah

Deskripsi:

Proses penentuan jumlah alokasi sumber daya ekonomi untuk masing-masing program dan kegiatan dalam bentuk satuan uang dimulai dari Persiapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian diturunkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dilanjutkan dengan Kebijakan Umum Anggaran(KUA), Nota Kesepakatan dan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-PD, disusun menjadi Rencana APBD dan setelah disahkan sebagai APBD.

No	Potensial Resiko	Pertanyaan	Jawaban
1	Koreksi atau revisi APBD pada saat dievaluasi oleh pemerintah Daerah.	Apakah koreksi atau revisi APBD dilakukan pada saat dievaluasi oleh pemerintah Daerah.	
2	Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah dalam prosesnya penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran (RKA-PD), Pelaksanaan Anggaran Dokumen (DPA-PD) dan dokumen penganggaran lainnya	Bagaimana pemahaman Perangkat Daerah dalam proses penyusunan RKA-PD, pelaksanaan DP-PD dan dokumen penganggaran lainnya	
3	Kurangnya peraturan/juklak operasional/juknis/instrumen SOP penganggaran yang digunakan dalam proses penyusunan APBD	Apakah tersedia peraturan/juklak operasional/juknis/instrumen SOP penganggaran yang cukup yang digunakan dalam proses penyusunan APBD	
4	Masih kurangnya pemahaman terhadap aturan dan kecermatan tim asistensi/verifikasi dalam	Bagaimana pemahaman terhadap aturan dan kecermatan tim asistensi/verifikasi	

	pemeriksaan/verifikasi RKA-PD dan DPA-dokumen PD.	dalam pemeriksaan/verifikasi RKA-PD dan DPA-dokumen PD.	
--	---	---	--

Kategori Resiko : Implementasi Anggaran
Informan : BPKPD (Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah)

Deskripsi:

Perangkat Daerah (PD) melaksanakan kegiatan pelaksanaan penerimaan dan belanja daerah sampai pencatatan dalam Laporan Realisasi Anggaran .

No.	Potensial Resiko	Pertanyaan	Jawaban
1	Pelaksanaan serapan anggaran sebagian besar menumpuk pada akhir tahun anggaran.	Bagaimana serapan anggaran, apakah tidak menumpuk pada akhir tahun	
2	Serapan anggaran tersebut tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang disediakan.	Apakah serapan anggaran tersebut tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang disediakan	
3	Kurangnya mekanisme penerbitan SP2D untuk kelebihan pembayaran	Bagaimana mekanisme penerbitan SP2D untuk kelebihan pembayaran	
4	Rendahnya kesadaran penyewa sarana sosial / fasilitas umum mengenai kewajiban membayar iuran (pajak dan retribusi).	Bagaimana kesadaran penyewa sarana sosial / fasilitas umum mengenai kewajiban membayar iuran (pajak dan retribusi).	
		Berapa persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (untuk tiga tahun terakhir)-bisa minta datanya	
		Sejauhmana pengaruh Covid-19 terhadap serapan penerimaan pendapatan daerah?	

Kategori Resiko : Administrasi
Informan : BPKPD, Sekertaris Daerah

Deskripsi:

Pencatatan pendapatan dan belanja daerah secara tertib, sistematis dan kronologis selama satu tahun anggaran.

No.	Potensial Resiko	Pertanyaan	Jawaban
1	Keterlambatan pelaporan pembaruan data karyawan terkait gaji dan tunjangan anak, sehingga sering terjadi kelebihan pembayaran tunjangan keluarga.	Apakah sering terjadi keterlambatan pelaporan pembaruan data karyawan terkait gaji dll	
2	Kurangnya ruang penyimpanan untuk catatan keuangan sedangkan catatan keuangan berlaku hingga 20 tahun.	Apakah terdapat ruang penyimpanan untuk catatan keuangan sedangkan catatan keuangan yang cukup	
3	Keakuratan data aset di setiap Perangkat Daerah (PD) belum optimal.	Bagaimana keakuratan data aset di setiap Perangkat Daerah (PD)	
4	SDM keuangan di PD yang tidak memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi.	Apakah SDM keuangan di PD memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi.	
5	Tidak ada sistem aplikasi penerimaan dan pencairan kas daerah yang terhubung antara pengelola kas daerah dan bank persepsi.	Apakah terdapat sistem aplikasi penerimaan dan pencairan kas daerah yang terhubung antara pengelola kas daerah dan bank persepsi.	
6	Belum optimalnya integrasi sistem aplikasi manajemen aset untuk mendukung laporan keuangan akrual.	Bagaimana integrasi sistem aplikasi manajemen aset untuk mendukung laporan keuangan akrual.	
7	Regulasi terkait standar akuntansi pemerintah masih perlu disesuaikan.	Bagaimana penerapan regulasi terkait standar akuntansi pemerintah	
8	Perubahan peraturan mengenai anggaran	Apakah terdapat perubahan peraturan	

	hibah dan bansos pada saat anggaran disahkan.	mengenai anggaran hibah dan bansos pada saat anggaran disahkan.	
9	Sertifikasi aset seperti tanah yang belum optimal terkait penanda bukti kepemilikan.	Apakah sertifikasi aset seperti tanah tersedia sebagai bukti kepemilikan	

Kategori Resiko : Pelaporan dan Akuntabilitas

Informan : BPKPD dan Inspektorat

Deskripsi:

Pada akhir periode pelaksanaan anggaran, pengguna anggaran melakukan kegiatan akuntabilitas melalui laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Nota Laporan Keuangan (CaLK). Untuk menilai kewajaran laporan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dengan memberikan pendapat yang wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak memberikan pendapat dan pendapat yang tidak wajar.

No.	Potensial Resiko	Pertanyaan	Jawaban
1	Pusat pelaporan pajak yang tidak terorganisir baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai yang disetorkan oleh bendahara belanja PD ke kantor pelayanan pajak.	Apakah pusat pelaporan pajak terorganisir, baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai yang disetorkan oleh bendahara belanja PD ke kantor pelayanan pajak.	.
2	Prosedur penilaian aset tidak memadai.	Sejauhmana prosedur penilaian aset (apakah cukup memadai).	
3	Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan	Bagaimana hasil pemeriksaan BPK (opini dalam tiga tahun terakhir)	

Kategori Resiko : Pengawasan

Informan : Inspektorat

Deskripsi:

Serangkaian kegiatan monitoring, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan kegiatan program dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan pengawasan pengelolaan keuangan dilakukan oleh aparatur

pengawas intern pemerintah, dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan memberikan pembinaan, pembinaan, supervisi, pelatihan, dan konsultasi.

No.	Potensial Resiko	Pertanyaan	Jawaban
1	Keterbatasan pengawasan SDM yang dimiliki Inspektorat Daerah.	Bagaimana kecukupan pengawasan SDM yang dimiliki Inspektorat Daerah	
2	Waktu pengawasan terbatas.	Apakah cukup waktu dalam pengawasan	
3	Anggaran pengawasan terbatas.	Bagaimana dengan anggaran pengawasan	
4	Auditee tidak atau kurang bersedia untuk bekerja sama	Bagaimana kerjasama dengan Auditee, apakah mendukung?	
5	Pengawasan dokumen sulit / tidak dapat diperoleh, baik karena hilang, rusak, atau karena auditee yang sengaja tidak mau menyerahkan dokumen.	Bagaimana dengan perolehan bukti/dokumen pemeriksaan, apakah cukup tersedia?	
6	Adanya peraturan perundang-undangan yang menghambat pengawasan, seperti peraturan tentang kerahasiaan bank dan pemeriksaan pajak terkait.	Apakah terdapat peraturan perundang-undangan yang menghambat pengawasan, seperti peraturan tentang kerahasiaan bank dan pemeriksaan pajak terkait.	
7	Temuan dari pengawasan tidak ditindaklanjuti atau dimanfaatkan.	Bagaimana dengan temuan dari pengawasan, apakah ditindaklanjuti atau dimanfaatkan.	